

Sambutan PONTJO SUTOWO



**Mencari Model
Kepemimpinan
Masa Depan :
Pemimpin Tipe
Negarawan
Cendekiawan**

Jakarta, 28 Juni 2024

Pontjo Sutowo

KETUA ALIANSI KEBANGSAAN

Assalamualaikum w.w.,
Salam Sejahtera,
Shalom,
Oom swastiatu,
Namo Budaya

Kepada yang sangat saya hormati

**Bapak Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan;
Bapak Ir. Siswono Yudo Husodo;
Bapak Andi Rizaldi, Kementerian Perindustrian;
Bapak Dr. Saefudin, Pusdatin Kementerian Pertanian;**

**Moderator : Dr. Susetya Herawati; dan
Seluruh peserta FGD yang saya muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti FGD hari ini dengan tema: **"Peta Jalan Penguatan Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*)"**. FGD ini merupakan seri diskusi dalam rangka pendalaman hasil "Diskusi Serial" yang dilaksanakan selama hampir tiga tahun sejak Maret 2019 oleh Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, HIPMI, dan Media Kompas.

Melalui diskusi serial tersebut, Aliansi Kebangsaan bersama mitra lembaga yang saya sebutkan tadi, telah berusaha menjadikan Pancasila sebagai "Ideologi kerja (*working ideology*)" dengan sungguh-sungguh mengembangkannya menjadi "kerangka paradigmatis" dalam praksis pembangunan yang memandu kebijakan pembangunan nasional dalam tiga ranah pembangunan yaitu: Ranah Tata Nilai, Ranah Tata Kelola, dan Ranah Tata Sejahtera.

Dalam ranah tata sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Cita Negara yang ingin dibangun, kesejahteraan umum yang hendak diwujudkan bagi bangsa Indonesia adalah kesejahteraan umum yang berkeadilan, yang didistribusikan berdasarkan prinsip keadilan distributif menyangkut harta (*wealth*), kesempatan (*opportunities*) dan status kehormatan (*privilege*).

Sedangkan untuk menumbuhkannya, diupayakan dengan perekonomian merdeka dan inklusif sebagai usaha bersama berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat koperatif), disertai penguasaan negara atas "kekayaan bersama" serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas keunggulan komparatif yang dimiliki untuk menjadi keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan "sains dan teknologi".

Pada era perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, potensi sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara tidak menjamin keberhasilan dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonominya secara berkelanjutan. Terbukti bahwa negara-negara yang mengembangkan ekonomi berbasis sains dan teknologi, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk menumbuhkembangkan ekonomi nasionalnya yang berkelanjutan.

Negara-negara yang telah menjalankan ekonomi berbasis sains dan teknologi, seperti Negara-negara Eropa pada umumnya dan beberapa Negara Asia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan ternyata lebih mampu mensejahterakan rakyatnya daripada negara-negara yang hanya bersandar pada kekayaan sumberdaya alam. Belajar dari pengalaman sukses Negara-negara tersebut, sudah seharusnya Indonesia mentransformasikan diri dari perekonomian berbasis ekstraktif, pertanian tradisional, dan manufaktur konvensional menuju ekonomi berbasis sains dan teknologi (*Knowledge Based Economy*).

Untuk itu, mendesak bagi bangsa Indonesia meningkatkan penguasaan sains dan teknologinya yang memang saat ini masih ketinggalan. Dalam laporan Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index*) tahun 2023 yang dirilis oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada Nopember 2023, Indonesia masih berada pada peringkat 61 dari 132 negara di dunia. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, capaian inovasi Indonesia masih kalah dari enam negara lainnya di kawasan ASEAN.

Dengan kapasitas penguasaan sains dan teknologi seperti itu, rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan, serta daya saing dalam percaturan global. Oleh karena itulah, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas sains dan teknologinya, dan meningkatkan kontribusinya untuk memajukan perekonomian. Hanya dengan pemanfaatan sains dan teknologi yang maksimal, visi pergeseran ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dapat tercapai.

Dari pengamatan yang mendalam, rendahnya penguasaan sains dan teknologi Indonesia antara lain disebabkan karena belum terbangunnya ekosistem Inovasi Nasional yang kondusif bagi pengembangan sains dan teknologi, baik pada aspek regulasi, tatakelola, alokasi sumberdaya, dan pengaturan kelembagaan. Dari sisi kelembagaan, sinergi dan kolaborasi tiga pihak (*Triple-Helix*) antara perguruan tinggi/lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha juga belum menunjukkan kinerja yang memadai.

Berlandaskan pada strategi *Triple Helix* ini, pengembangan sains dan teknologi tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus ada upaya sinergetik dari ketiga pihak tersebut. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha, serta pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, terutama dalam mendorong proses hilirisasi yaitu proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada dunia usaha/industri atau masyarakat untuk penerapan hingga pemasarannya.

Dalam kolaborasi kelembagaan *Triple Helix* tersebut, dunia usaha/industri berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Bukti empirik menunjukkan bahwa motor inovasi di suatu negara adalah dunia usaha/industri. Keberhasilan Finlandia dalam merubah perekonomian yang semula berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis sains dan teknologi dimotori oleh Nokia, sebuah perusahaan. Ini satu bukti begitu strategis peran dunia usaha dalam mendorong gerakan ekonomi berbasis pengetahuan.

Peran strategis inilah yang harus selalu disadari dan diperhatikan tidak saja oleh dunia usaha kita, tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat. Karenanya, memajukan dunia usaha/industri harus menjadi kepentingan dan tanggungjawab kita bersama segenap bangsa Indonesia.

Pengusaha sebagai bagian dari masyarakat harus ambil tanggungjawab atas kemajuan teknologi bangsa ini. Untuk itu, Pengusaha Indonesia sudah seharusnya tidak sekedar menjadi "benefit seekers" tetapi juga memiliki tanggungjawab atas kepentingan nasional sebagai wujud dari kewajiban konstitusional "bela negara" atas bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, pengusahanya harus siap, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya.

Jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3,1% dari jumlah penduduk. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8,76%), Malaysia (4,74%), dan Thailand (4,26%) . Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki ratio kewirausahaan sampai 12%.

Dan dari jumlah ini, tidak semua pengusaha yang ada saat ini ikut berperan dalam mengembangkan inovasi teknologi yang sangat diperlukan dalam mendorong kemandirian dan transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Dalam sektor pertanian misalnya, para petani kita saat ini mayoritas masih sebagai "buruh tani" dan bukan "pengusaha tani" sebagaimana para petani di negara-negara lain yang maju sektor pertaniannya.

Inilah tantangan besar dunia usaha kita dewasa ini yang harus dijawab. Kita perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengusaha karena dunia usaha merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga pusat berkembangnya teknologi yang sangat menentukan tingkat kemandirian ekonomi bangsa dan meningkatkan daya saing dalam persaingan global.

Dalam upaya penguatan dunia usaha yang inovatif, berbasis sains dan teknologi, isu strategis yang juga harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari kita adalah isu "daya beli nasional (*domestic purchasing power*)" baik itu daya beli masyarakat maupun daya beli pemerintah (*government expenditure*)" yang merupakan kekuatan pendorong (*driving force*) bagi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya "daya beli nasional" dikelola secara bijak untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional termasuk kepentingan penguatan dunia usaha kita.

Dalam pengelolaan daya beli nasional, kita masih menghadapi berbagai persoalan dan hambatan, baik yang menyangkut kultur, hambatan birokrasi, kebijakan, regulasi, dll. Salah satu persoalan besar yang masih kita hadapi adalah masih berlangsungnya praktik kartel atau mafia pemburu rente (*rent seeking*) dan "state capture" dalam bidang perekonomian/perdagangan yang sangat membebani upaya transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Menyadari demikian strategisnya peran dunia usaha dalam pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*). maka harus ada upaya sungguh-sungguh dan kolaboratif dari semua pihak dalam menguatkan peran dunia usaha. Untuk itulah kiranya perlu diperdalam dan didiskusikan dalam FGD kali ini untuk selanjutnya disusun menjadi "Peta Jalan Penguatan Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*)" sebagaimana tema FGD hari ini.

Peserta FGD yang berbahagia,

Mengingat masih banyak persoalan-persoalan mendasar yang kita hadapi dalam penguatan dunia usaha untuk pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia, saya berharap diskusi hari ini bisa merangsang pertukaran pikiran dan urun gagasan yang dapat memperkaya perspektif dan substansi tema FGD hari ini.

Akhirnya saya atas nama Aliansi Kebangsaan menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada para narasumber, moderator, dan seluruh peserta FGD atas partisipasinya dalam diskusi ini. Semoga upaya kita ini bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

Wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warrahmatullahi wa barokatuh.

Jakarta, 28 Juni 2024

Pontjo Sutowo